

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Asshiddiqie, J. (2006). *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: THC Mandiri.
- Atmosudirdjo, S. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Pekanbaru: Pustaka Pelajar.
- Basah, S. (1992). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Chaniago, S. M. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Goralph, F. (2020). *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan*. Semarang: Pilar Nusantara.
- Hadjon, P. M. (2010). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hidjaz, K. (2010). *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Marbun, S. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustafa, B. (2001). *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nugraha, S. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan. (2007). *Keresahan Dalam Pedesaan*. Jakarta: Yayasan Pancasila Sakti.
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rakhmat, M. (2014). *Hukum Administrasi Negara Di Indonesia*. Bandung: Logoz Publishing.
- Sugandha, D. (1991). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyanto, B. (2009). *Manajemen Pemerintahan*. Tangerang: CV Media Brilian.
- Sutaryo. (2004). *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafrudin, A. (1991). *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Wasistiono, S., & Tahir, I. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokusmedia.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, H. (2007). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539)
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205)

Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Klaten

(Berita Daerah Klaten Kabupaten Klaten Nomor 59)

Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Nomor 47)

Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66)

Jurnal Ilmiah

Akbal, M. (2016). Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 2, 2016.

Armansyah, Y. (2016). Menyoal Relevansi Kebijakan Otonomi Daerah Dan Otonomi Pendidikan Dikaji Dari Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Islamic Education Management*, Vol. 2, No. 1, 2016.

Bunga, M. (2019). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 827.

Dewirahmadanirwati. (2018). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 45.

Hasjimzum, Y. (2014). Model Demokrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Reformasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 447.

Hendra & Barhamudin. (2021). Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Solusi*, 238.

Marwan, A., & Martha Julianthy, E. (2018). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 4.

Pamuji, K. (2011). Implikasi Kebijakan Pendaerahan Pengelolaan PBB Setelah Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 114.

Saiful. (2022). Tinjauan Peran Pemimpin Perubahan Dalam Organisasi. *Jurnal Yonetim*, 67.

Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 27.

Tawulo, J. &. (2015). Fasilitator Dalam Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Profetik*, 19-30.

Media Online

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Pengawasan Keuangan Desa dengan aplikasi SISKEUDES,

Url (<https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>), diakses pada 4 Oktober 2022.

Dosen Pendidikan, 14 Agustus 2022, 13 Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli,

Url (<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli/>), diakses pada 4 Oktober 2022.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 24 Juli 2015, Pengertian Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah,

Url (<https://setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/>), diakses pada 4 Oktober 2022.

Tatang, 27 Januari 2011, Fasilitasi sebagai upaya pemberdayaan Pelaku Utama,

Url (<https://suksesmina.wordpress.com/2011/01/27/fasilitasi-sebagai-upaya-pemberdayaan-pelaku-utama/>), diakses pada 7 Oktober 2022.

Wikiapbn, 12 Maret 2015, Aplikasi “Online Monitoring” Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara,

Url (<https://www.wikiapbn.org/aplikasi-online-monitoring-sistem-perbendaharaan-dan-anggaran-negara/>), diakses pada 4 Oktober 2022.